

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat strategis serta penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia kebutuhan produksi dalam negeri, sandang dan papan, serta sebagai penghasil komoditas ekspor non-migas untuk menarik devisa.

Peningkatan perekonomian nasional khususnya di sektor pertanian menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah yakni melalui Kementerian Pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana salah satunya dibidang pertanian dalam upayanya menjaga ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani.

Dasar hukum RPJMN tahun 2015-2019 mengacu kepada arahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dengan upaya teknisnya adalah menjaga ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani dapat diwujudkan melalui revitalisasi dalam bidang pertanian.

Revitalisasi mempunyai peranan yang strategis dalam upayanya menempatkan kembali sektor pertanian menjadi sektor yang vital, proporsional dan kontekstual yang pada hakikatnya mengembalikan fungsi sektor pertanian, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam upayanya meningkatkan peran sektor pertanian tanpa mengabaikan sektor lainnya. (Badan Litbang Pertanian, 2005).

Revitalisasi pertanian merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian sehubungan dengan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Persoalan tersebut misalnya meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya luas kepemilikan lahan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, serta berbagai permasalahan lain (Bappenas, 2011).

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian tersebut harus diminimalisir. Sehingga salah satu penunjang keberhasilan revitalisasi pertanian adalah proses penyuluhan yang massif terhadap petani maupun kelompok tani. Guna mendukung revitalisasi pertanian maka yang sangat dibutuhkan adalah peran penyuluhan. Untuk hal tersebut pemerintah melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berusaha meningkatkan baik produksi pertanian maupun pengembangan sumber daya petaninya melalui penyuluh-penyuluh yang tersebar di berbagai wilayah.

Jawa Tengah termasuk wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dan produksi pertanian. Namun dari segi geografis serta sumber daya alam yang mendukung tidak diimbangi dengan sumber daya penyuluh yang memadai. Hal ini selaras dengan data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian (2016) yakni jumlah penyuluh pertanian di Jawa Tengah cenderung menurun setiap tahunnya. Penurunan jumlah penyuluh pertanian cukup signifikan dimana sebelumnya di tahun 2013 sempat mengalami kenaikan. Berikut Tabel 1 perbandingan jumlah penyuluh pertanian menurut Provinsi tahun 2012-2016.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Provinsi 2012-2016

Provinsi	Penyuluh Pertanian PNS				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	2.643	2.464	2.414	2.187	2.039
Jawa Tengah	2.336	2.370	2.289	2.075	1.935
Jawa Barat	2.145	1.975	1.819	1.539	1.389
Sulawesi Selatan	1.894	1.798	1.851	1.895	1.868
Sumatera Utara	1.356	1.172	1.159	1.081	1.073
Aceh	1.109	1.109	1.194	1.101	1.092
Indonesia	28.494	27.476	27.153	25.713	25.290

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian BPPSDM, 2019

Dari data BPPSDM diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang penyuluh terbesar ke dua setelah Jawa Timur secara nasional. Bahkan menurut data BPS Jawa Tengah (2013) Pertanian di Jawa Tengah dikategorikan sebagai pondasi ekonomi jawa tengah karena memiliki topologi perbukitan serta faktor budaya yang akan mendorong beragamnya komoditas pertanian yang dihasilkan.

Hal tersebut didukung survei BPS pada tahun (2013) dimana Jawa Tengah 90 persen merupakan daerah pedesaan, dan secara administratif terdapat 7.809 pedesaan dan 769 desa perkotaan. Provinsi jawa tengah juga menjadi provinsi terbesar ketiga dari sisi jumlah penduduk dan salah satu daerah penyangga pangan nasional serta lumbung pangan nasional.

Dengan potensi yang tersedia provinsi jawa tengah mampu menjadi provinsi yang dapat optimal dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia akan tetapi, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya alamnya.

Peningkatan sumber daya manusia demi mewujudkan ketahanan pangan dapat diupayakan dengan ditingkatkan juga peranan penyuluh pertanian, akan tetapi penyuluh yang terdapat di Jawa Tengah setiap tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun terdapat kenaikan akan tetapi tidak terlalu berdampak kepada hasil produksi pertanian. Hal ini diperkuat dengan data BPS (2013) penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diikuti dengan meningkatnya penyerapan kerja di sektor non pertanian terutama di sektor industry maupun jasa.

Penurunan jumlah penyuluh di tingkat Provinsi Jawa Tengah mempengaruhi juga pada tingkat Kabupaten. Hal ini tercantum pada data berikut:

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penyuluh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah Penyuluh Pertanian		
	Kec	Desa	Jumlah Penyuluh PNS
Magelang	21	372	90
Tegal	18	287	84
Wonogiri	25	294	83
Banyumas	27	331	81
Jawa Tengah	573	8.578	1.935

Sumber: sistem informasi Manajemen Penyuluh Pertanian BPPSDM, 2019

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi baik di sektor wisata, industri dan pertanian Kabupaten Banyumas menempati peringkat keempat dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk tenaga penyuluh. jumlah penyuluh di Kabupaten Banyumas menurut BPPSDM tahun 2016 sebanyak 342 orang dari 27 kecamatan dan 331 desa. Dari total 342 penyuluh yang terdapat di Kecamatan Banyumas tidak semuanya merupakan PNS, mereka terbagi menjadi 81 penyuluh pns, 107 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian serta 154 penyuluh swadaya. Dengan

pembagian tersebut penyuluh harus bekerja ekstra dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan petani.

Upaya peningkatan produksi pertanian melalui pemberdayaan petani oleh penyuluh menjadi subjek yang terus dikembangkan di Kecamatan Baturraden, hal ini dikarenakan wilayahnya yang memiliki potensi baik di sektor wisata, peternakan dan juga pertanian. Hal ini didukung dengan data BPS (2015) Kecamatan Baturraden dari 4.553,008 Ha luas wilayahnya 53% diantaranya adalah lahan produksi pertanian padi sawah.

Realitasnya menurut penelitian yang dilakukan LPPM Unsoed (2014) Kecamatan Baturraden justru tergolong salah satu kecamatan yang tergolong tertinggal akan tetapi jika dilihat dari tabel produksi dan luas panen di Kecamatan Baturraden menurut data BPS tahun 2010-2015 memiliki potensi sebagai Kecamatan penghasil padi, meskipun tahun 2010-2011 mengalami peningkatan dan kembali turun produktifitasnya pada tahun 2012-2014 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2015. Berikut Tabel 3 produksi padi sawah.

Tabel 3. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Tahun 2010 – 2015 Di Kecamatan Baturraden

No	Tahun	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)
1.	2010	390.554	2414.33
2.	2011	357.122	2494
3.	2012	345.761	2148.77
4.	2013	348.196	2143
5.	2014	316.926	2040
6.	2015	318.767	2408

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2019

Peningkatan produksi pertanian juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyuluh. Hal ini didukung oleh pernyataan Ban (1999) Subyek pembangunan pertanian adalah petani, masyarakat petani pada umumnya dan kelompok tani pada khususnya. Sebagai salah satu komponen dalam sistem agribisnis, maka peran kelompok tani sangat menentukan keberhasilan penyuluhan. Dalam upaya meningkatkan revitaliasi pertanian sinergi antara pemerintah dan petani diperlukan karena secara teoritis pengembangan kelompok tani dilaksanakan dengan menumbuhkan kesadaran para petani, dimana keberadaan kelompok tani untuk meningkatkan baik pengetahuan ataupun meningkatkan pribadi petani tersebut.

Namun realitasnya dari potensi pertanian yang dimiliki oleh Kecamatan Baturraden tidak diimbangi oleh sumber daya penyuluh pertanian. Dari total 342 penyuluh yang ada di Kabupaten Banyumas hanya terdapat 7 penyuluh pertanian yang harus bertanggung jawab membina 41 kelompok tani yang berada di 12 desa. Berikut data perbandingan jumlah penyuluh pertanian Kecamatan Baturraden dengan Kabupaten Banyumas.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Penyuluh Tahun 2016

Provinsi	Penyuluh Pertanian PNS		
	Kec	Desa	Jumlah Penyuluh
Banyumas	27	331	342
Baturraden	-	12	7

Sumber: sistem informasi Manajemen Penyuluh Pertanian BPPSDM

Hal ini menunjukkan rata-rata 1 penyuluh membina lebih dari 1 desa. idealnya penyuluh menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDM) bahwa idealnya penyuluh adalah satu desa memiliki satu penyuluh. Hal tersebut didukung dengan adanya UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani Pasal 46 yang berbunyi bahwa penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam satu desa.

Mengingat potensi yang dimiliki Kecamatan Baturraden sebagai penghasil padi tentu juga harus memiliki kelembagaan petani yang berkembang dan mandiri agar petani lebih optimal melaksanakan usaha taninya untuk meningkatkan hasil produksinya. Salah satunya melalui kelompok tani, di Kecamatan Baturraden yang memiliki jumlah kelompok tani yaitu sebanyak 41 yang secara keseluruhan produksi pertaniannya berfokus kepada padi sawah.

Dari survei pendahuluan, tingginya anggota dalam kelompok tani merupakan hal yang harus menjadi perhatian bagi penyuluh dalam mentransferkan informasi dan teknologi guna dapat dimaksimalkan oleh petani, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh untuk menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan baik kelompok tani maupun produksi hasil pertanian di tengah-tengah anggapan negatif sebagian kalangan tentang peran penyuluh pertanian.

Vitalnya peranan penyuluh pertanian baik dalam mengembangkan produksi dan sumber daya manusianya hal tersebut diatur dalam amanat Undang-Undang No. 16 tahun 2006, penyuluh pertanian harus mempunyai kemampuan, keterampilan dan semangat kerja untuk memajukan pertanian di Indonesia.

Namun dalam kenyataannya tidak semua penyuluh mempunyai kemampuan, keterampilan dan semangat kerja seperti yang tercantum dalam undang-undang. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain: kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, insentif, budaya kerja, komunikasi, pemberian gizi pegawai, pelatihan dan masih banyak yang lainnya. Semua faktor itu pasti berpengaruh ada yang dominan dan ada juga yang tidak. Hal ini bisa dipahami karena masing-masing individu penyuluh mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman, motivasi, kemampuan dasar, dan hal lainnya yang berbeda, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja mereka. Oleh karena itu kehadiran seorang pemimpin yang mampu

memotivasi, menyamakan persepsi, menyatukan visi dan misi, sangat dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tersebut yang berjudul *“Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani, kendala-kendala dalam melakukan kerja-kerja penyuluhan dari Kecamatan Baturraden serta solusi dan inovasi yang tepat untuk pemberdayaan kelompok tani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyuluh di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsinya ?
3. Bagaimana upaya BP3K dalam meningkatkan peran penyuluh pertanian di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran penyuluh dalam mengembangkan kelompok tani di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyuluh pertanian di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.
3. Mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan penyuluh pertanian di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pertanian (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini sebagai informasi penelitian dan referensi dalam penentuan sumber pustaka

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis.

